



BAPENDA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAJAK KITA, UNTUK KITA

LPPD TAHUN 2025

Disusun Oleh
BAPENDA LAMBAR



KATA PENGANTAR

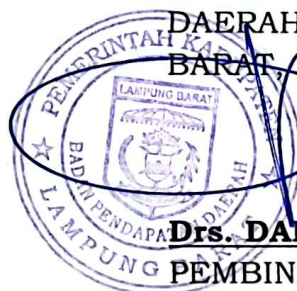
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD ini mencakup capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dokumen ini digunakan sebagai dasar penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Penyusunan LPPD ini memperhatikan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar pengolahan data indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Demikian pengantar ini disampaikan. Semoga LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan evaluasi kinerja dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Liwa, 24 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT



Drs. DAMAN NASIR, M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
BAB II URUSAN KONKUREN	3
A. Ringkasan Urusan	3
B. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	3
C. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	6
D. Jumlah Pegawai.....	22
E. Kondisi Sarana dan Prasarana	23
F. Permasalahan dan Solusi.....	24
G. Tingkat Pencapaian Kinerja.....	25
BAB III TUGAS PEMBANTUAN	28
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Program, Kegiatan	7
Tabel 2.2. Pencapaian Indikator Kinerja BAPENDA Tahun 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD Kepala Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD, di mana indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait. Untuk itulah, LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun, disertai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
- 2) Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
- 3) Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

URUSAN KONKUREN

A. RINGKASAN URUSAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pendapatan.

B. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025, dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan jumlah Program termasuk Program Rutin sebanyak 3 program, jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 12 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin sebanyak 41 Sub Kegiatan. Alokasi dana tahun 2025 setelah Perubahan APBD untuk Belanja sebesar Rp. 5.981.584.800,00 terealisasi sampai dengan triwulan IV/akhir tahun anggaran sebesar Rp.5.682.121.842.00 atau 94.99%

I. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada TA. 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 11. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 13. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 14. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 28. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 29. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
- III. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 12) Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

30. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
31. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
32. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
33. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
34. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
35. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
36. Penetapan Wajib Pajak Daerah
37. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
38. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
39. Penagihan Pajak Daerah
40. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
41. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Capaian pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

TABEL 2.1.
EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah	70,69%	71,44%	101 %	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah	70,69 %	71,44 %	101%	3.288.447.800	3.095.741.775	94.14 %
1		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen 7 Dokumen 29 Dokumen	13 Dokumen 7 Dokumen 29 Dokumen	100% 100% 100%	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 100% - 100% - 100%	58.390.100	58.370.000	99,97 %

1)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	31.777.500	31.757.000	99,94%
2)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5.823.800	5.823.800	100%
3)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3.363.000	3.363.000	100%
4)		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6.224.400	6.224.400	100%
5)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6.261.400	6.261.400	100%

			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
6)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.820.000	1.820.000	100%
7)		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	3.120.000	3.120.000	100%

2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 	65 Orang/Bl n 1 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	20 Orang/Bl n 1 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	30.77 %	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi An 	65 Orang/Bln 1 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	20 Orang/Bln 1 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	- 30,77 % - 100% - 100% - 100%	2.550.141. 500	2.395.334. 916	93.93 %
---	---	---	---	---	------------	---	---	--	---	-------------------	-------------------	------------

8)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org/Bln	20 Orang/Bl n	80%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	2 Orang/ 0 Bulan	80 %	2.541.401.500	2.386.594.916	93.91%
9)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	1 Lapora n	100%	3.450.000	3.450.000	100%
10)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran	2 Lapora n	2 Lapora n	100%	2.815.000	2.815.000	100%
11)		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Tersedianya DokPelaporan Analisis Prognosis Realisasi angg	100%	100%	100%	Jumlah DokPelapora n dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	2.475.000	2.475.000	100%

3		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	4.402.000	4.402.000	100%
12)		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	4.402.000	4.402.000	100%
4		Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	29.485.000	29.410.000	99,75 %
13)		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	29.485.000	29.410.000	99,75%
5		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen 6 Orang	1 Dokumen 3 Orang	- 100% - 50%	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	- 1 Dokumen - 6 Orang	- 1 Dokumen - 3 Orang	- 100% - 50%	29.370.000	29.370.000	100%

							dan Pelatihan						
14)		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	10.120.000	10.120.000	100%
15)		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	3 Orang	300%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	3 Orang	300%	19.250.000	19.250.000	100%
6		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu - Terlaksananya 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Paket - 1 Paket 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 	183.428.400	179.580.062	97.90%

			a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
16)		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1.575.000	1.575.000	100%
17)		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	19.030.600	19.030.600	100%
18)		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	7.860.000	4.020.000	51.15%
19		Fasilitasi	Terlaksananya	12	12	100%	Jumlah	12	1 Laporan	100%		11.059.000	100%

)		Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan		Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2 n		11.059.000		
20)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	143.903.800	143.895.462	99,99%
7		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42 Unit	42 Unit	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	42 Unit	1 42 Unit	100%	92.100.000	91.900.000	99,78 %
21)		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%	92.100.000	91.900.000	99,78%
8		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- 1 Laporan	- 1 Laporan	- 100%	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah	- 1 Laporan	- 1 Laporan	- 100% - 100%	118.976.300	109.324.690	91.89 %

							Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
22)		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	100%	4.750.000	4.750.000	100%
23)		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1 Laporan	100%	36.185.000	27.008.390	74.64%
24)		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1 Laporan	100%	78.041.300	77.566.300	99.39%
9		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Unit	%	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	48 Unit	Unit		222.154.500	198.050.007	89.15 %

25)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	13 Unit	118%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	1 Unit 3	118%	171,550.00 0	147.445.50 7	85,95%
26)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	100%	11.300.000	11.300.000	100%
27)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	39.304.500	39.304.500	100%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya a pengelolaan keuangan daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase penganggara n Pendapatan Daerah yang tepat waktu	- 100%	- 100%	- 100%	113.043.0 00	106.869.13 1	94.54 %

10		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya a Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	- Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 2 Dokumen	- 2 Dokumen	- 100%	68.185.00 0	62.011.131	90.95 %
28)		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	68.185.000	62.011.131	90.95%
11		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya a Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	44.858.00 0	44.858.000	100%
29)		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	44.858.000	44.858.000	100%

		Kas					Penempatan Uang						
III		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya a pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	2.580.094. 000	2.479.510. 936	96.10 %
12		Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya a pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- 100% 100%	2.580.094. 000	2.479.510. 936	96.10 %
30)		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokum en	4 Dokum en	100%	215.177.00 0	213.018.69 0	99.00%
31)		Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Pajak Daerah	2 Lapora n	2 Lapora n	100%	126.728.00 0	126.227.72 1	99.61%
32)		Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana	50 Unit	35 Unit	70%%	Jumlah Sarana dan Prasarana	50 Unit	35Unit	70%	57.585.000	55.110.000	95.70%

		Pengelolaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah				Pengelolaan Pajak Daerah						
33)		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	457.555.000	412.322.000	90.11%
34)		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	100,00 %	486.205.000	484.905000	99.73%
35)		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	343.775.600	341.087.493	99.22%

36)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	162.373.40 0	162.372.90 0	100%
37)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen	100%	100%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	50.161.000	50.106.063	99.89%
38)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan Konsultasi Pajak	1 Layanan	1 Layanan	100%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100%	102.280.00 0	102.280.00 0	77.72%
39)	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	282.887.00 0	282.887.00 0	99.99%
40)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	42.375.000	39.892.000	94.14%
41)	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Dae	8 Laporan	8 Laporan	100%	252.992.00 0	232.125.62 5	91.75%

D. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Lampung Barat adalah 20 orang.

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah :

- 1) Sarjana Strata 2 (S2) : 6 orang
- 2) Sarjana Strata 1 (S1) : 13 orang
- 3) D III : - orang
- 4) SLTA sederajat : 1 orang

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan Ruang

Jumlah Pegawai BADAN PENDAPATAN DAERAH menurut Golongan Ruang adalah :

- 1) Pegawai Golongan IV : 4 orang
- 2) Pegawai Golongan III : 11 orang
- 3) Pegawai Golongan II : - orang
- 4) PPPK (Gol IX) : 4 Orang
- 5) PPPK (Gol V) : 1 Orang

d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Lampung Barat adalah 14 orang, yang terdiri dari :

- 1) Pejabat Eselon II : 1 orang
- 2) Pejabat Eselon III.a : 1 orang
- 3) Pejabat Eselon III.b : 3 orang
- 4) Pejabat Eselon IV.a : 7 orang
- 5) Pejabat Fungsional : 2 orang

e. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi

Jumlah (PNS) berdasarkan Diklat Penjurangan Struktural Tertinggi adalah :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) Golongan IV/c | : 1 Orang (Diklat Pim. II) |
| 2) Golongan IV/a | : 1 Orang (Diklat Pim. III) |
| 3) Golongan IV/a | : 3 Orang (Diklat Pim. IV) |
| 4) Golongan III/d | : 2 Orang (Diklat Pim. IV) |

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

a. Gedung dan bangunan :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) Bangunan gedung A | : 212 m ² |
| 2) Bangunan gedung B | : 146 m ² |

b. Mesin dan peralatan :

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1) Kendaraan roda empat | : 3 unit |
| 2) Kendaraan roda dua | : 9 unit |

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan umum yang masih dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Rendahnya PAD mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Penyebab :

- Potensi PAD belum tergali dan terkelola dengan optimal.
- Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, masih ada daerah-daerah yang sulit terjangkau, wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemecahan masalah yang dapat dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara tepat tujuan, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- a. Melaksanakan pendataan potensi PAD sebagai langkah awal eksplorasi potensi PAD.
 - b. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang ada melalui pemahaman peraturan perundang-undangan maupun melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
 - d. Terus melakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan disiplin aparatur.
 - e. Melakukan rekonsiliasi secara rutin baik antar bidang di BADAN PENDAPATAN DAERAH maupun dengan seluruh OPD, Kecamatan dan Pekon dalam pelaksanaan tugas, dalam rangka melakukan validasi data dan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, sehingga tercapai target kinerja.
 - f. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD, Kecamatan dan Pekon maupun *stake holder* dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat menghasilkan output kegiatan yang tepat waktu dan akurat, dalam rangka mencapai target kinerja.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendukung Capaian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Solusi yang dilakukan adalah : Telah menyampaikan surat usulan permohonan staf pada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pengembangan dan SDM
3. Salah satu upaya dalam peningkatan PAD, terlaksananya kegiatan dengan pemasangan Banner dan spanduk di setiap Kantor Kecamatan dan Kantor Pekon/Kelurahan. Akan tetapi tidak semua masyarakat terutama wajib Pajak yang mengetahui dan membaca Banner dan Spanduk yang terpasang.

Solusinya :

1. Telah dilakukan penyebaran informasi tambahan melalui : Media Massa, Media elektronik (Bekerjasama dengan Radio Daerah Lampung Barat)

2. Menghadiri rapat koordinasi di 15 kecamatan dalam rangka sinergi pemerintah Kabupaten/Kecamatan dan Pekon/Kelurahan dalam upaya optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

G. TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja sebagaimana tercantum di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026. Indikator kinerja tersebut menjadi acuan pencapaian kinerja OPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD, serta membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat. Pencapaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Pecapaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Persentase peningkatan PAD.	6%	126,06 %	2101%

Sumber data : Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sasaran “*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*” dengan indikator *Persentase Peningkatan PAD* pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp16.047.580.265,- selanjutnya, pada Tahun 2025 realisasi peningkatan PAD mencapai Rp36.278.559.133,- atau sebesar 126,06% yang artinya terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 2101 %. Dengan demikian, capaian kinerja pada Tahun 2025 **termasuk dalam kategori sangat berhasil karena melampaui target yang ditetapkan**, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Formula perhitungan capaian kinerja indikator *Persentase Peningkatan PAD* adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja (%) =

$$\frac{\sum \text{Realisasi PAD Tahun ini} - \sum \text{Realisasi Anggaran PAD tahun lalu}}{\sum \text{Realisasi Anggaran PAD tahun lalu}} \times 100$$

Dengan pencapaian untuk indikator sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 36.278.559.133} - \text{Rp. 16.047.580.265}}{\text{Rp. 16.047.580.265}} \times 100\% = 126,06\%$$

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2. di atas, di mana seluruh target kinerja tercapai, bahkan melebihi target untuk indikator kinerja Persentase peningkatan PAD. Adapun faktor-faktor pendukung yang mendorong peningkatan realisasi target kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, antara lain:

- a. Adanya peningkatan Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 mencapai **126,06%**, jauh melampaui target kinerja sebesar **6%** yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat disebabkan oleh beberapa faktor kebijakan. Sejak Mei 2025, sejalan dengan pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen PKB dan BBNKB). Kebijakan tersebut mengakibatkan kendaraan bermotor dengan kode seri Kabupaten Lampung Barat yang melakukan pembayaran PKB maupun proses Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan pungutan tambahan yang menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan tambahan dimaksud dicatat dan dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- b. untuk memaksimalkan penyerapan Opsen PKB-BBNKB Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan UPTD Samsat kemudian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga memaksimalkan penggunaan Media sosial, media cetak serta media elektronik untuk melakukan sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, selain itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat membantu meminjamkan peralatan serta menempatkan beberapa pegawai pada UPTD Samsat Liwa untuk membantu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga terus melakukan intensifikasi penyerapan pajak daerah lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan terus memaksimalkan sosialisasi dengan berbagai media dan platform serta terus memaksimalkan penagihan pajak daerah dengan berbagai upaya baik penagihan secara langsung ataupun dengan memanfaatkan aplikasi Pajak Mandiri-sistem aplikasi non tunai (PM-SANTUN);
- d. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah juga terus melakukan upaya ekstensifikasi dengan melakukan kegiatan pendataan objek pajak daerah baru. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga berdampak peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. Untuk memaksimalkan penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Badan Pendapatan Daerah juga memberikan hadiah Luns PBB terbaik bagi Pekon/Kelurahan dan juga Kecamatan.

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pendapatan dan pada Tahun Anggaran 2025 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bahan penyusunan LPPD Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

LPPD ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat guna terwujudnya *good governance* serta terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa 34812 Telp (0728) 21107
Laman : www.lampungbaratkab.go.id Pos.el : bapendalambar@gmail.com

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.	Pajak Daerah	36.278.559.133,00	34.573.564.765,00	104,93	
2.	Retribusi Daerah	46.547.325.011,00	43.619.475.598,01	106,71	
3.	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.296.507.077,37	3.296.507.077,37	100	
4.	Lain-lain PAD yang sah	14.753.821.746,60	9.274.518.551,57	159,08	
	JUMLAH	100.876.212.967,97	90.764.065.991,95	111,14	

Sumber Data : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Liwa, 24 Februari 2026

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR., M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa 34812 Telp (0728) 21107
Laman : www.lampungbaratkab.go.id Pos.el : bapendalambar@gmail.com

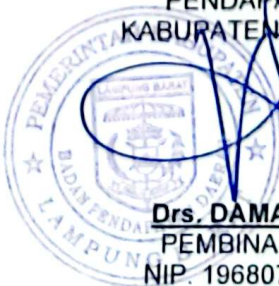
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH				
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	• Pajak Daerah	36.278.559.133,00	34.573.564.765,00	104,93	
	• Retribusi Daerah	46.547.325.011,00	43.619.475.598,01	106,71	
	• Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.296.507.077,37	3.296.507.077,37	100	
	• Lain-lain PAD yang sah	14.753.821.746,60	9.274.518.551,57	159,08	
2.	PENDAPATAN TRANSFER				
	• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	870.856.410.768,00	892.990.891.725,00	97,52	
	• Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.821.776.011,00	68.461.701.068,00	61,09	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	• Pendapatan Hibah	4.037.720.000,00	4.037.720.000,00	100	
	• Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4.121.435.790,00	4.121.435.790,00	100	
	JUMLAH	1.021.713.555.536,97	1.060.375.814.574,95	96,35	

Sumber Data : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Liwa, 24 Februari 2026

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Drs. DAMAN NASIR., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002